

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan usaha dalam rangka memperoleh suatu perubahan, yang oleh Soepardjo Adikusumo dikatakan sebagai peluang untuk memperoleh suatu kemampuan dalam berbagai sektor. Lengkapnya :

Pembangunan telah memberi peluang kemampuan untuk berkembang baik secara sosial, ekonomi, maupun politik di setiap lapisan dan unsur masyarakat, sehingga dengan demikian diperoleh keterandalan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa yang lestari.

Bagi negara kita yang sedang giat melakukan pembangunan dalam rangka memperjuangkan bangsa yang lestari, pendidikan merupakan investment yang paling utama. Karena itu berbagai upaya pendidikan di bumi ini senantiasa akan dilakukan.

Untuk terselenggaranya pendidikan yang memberi sumbangan pada pembangunan yang giat digalakan di negeri ini, maka perlu suatu konsep pendidikan yang sejalan dengan ideologi negara.

Di Indonesia konsep pendidikan yang sejalan

dengan ideologi itu adalah pendidikan yang dirumuskan dalam UUSPN tahun 1989 berwujud sistem pendidikan nasional yang diamanati untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun cita-cita pendidikan yang tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 1945 adalah "Mencerdaskan kehidupan bangsa", dan pada pasal 31 ayat 1 tercantum "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan pada ayat 2 " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang ". Cita-cita tersebut selanjutnya oleh wakil-wakil rakyat dirumuskan berbentuk tujuan pendidikan nasional yang setiap lima tahunnya ditinjau kembali.

Tahun 1988 tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. ( GBHN, 1988 )

Tujuan tersebut sifatnya masih umum dan karena itu lembaga-lembaga pendidikan yang ada masing-masing mempunyai tujuan yang sejalan dan mendukung pada tujuan tersebut di atas.

Tujuan pendidikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional terdiri atas :

- Mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila.
- Memberikan bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
- Memberikan bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya.

Salah satu indikator yang dapat memberi gambaran tentang "Sejauhmana tujuan pendidikan tersebut telah tercapai?", adalah dengan melihat prestasi belajar (hasil belajar) yang ditampilkan siswa. Hal itu sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Achmad Sanusi dalam bukunya Beberapa Dimensi Mutu Pendidikan diantaranya " belajar dan hasil belajar itu akhirnya merupakan ujung tombak mutu pendidikan " ( 1990 , h. 3 ). Ada berbagai cara untuk menampilkan prestasi belajar antara lain melalui ulangan harian, tes subsumatif, sumatif, EBTA dan EBTANAS.

Dari sekian banyak alat tampilan prestasi belajar

tersebut, EBTANAS biasanya dianggap sebagai tampilan yang paling representatif sebagai alat ukur keberhasilan siswa, dan sampai saat ini tampilan tersebut masih dianggap sebagai bentuk tampilan yang paling representatif. Karena anggapan tersebut masih kuat melekat maka untuk mengukur kemampuan siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pun dilihat dari hasil NEM ( Nilai Ebtanas Murni ) yang ditampilkannya.

Di bawah ini diperoleh data NEM yang ditampilkan oleh siswa salah satu SMA swasta kodya Bandung pada tahun ajaran 1989-1990, lengkapnya sebagai berikut :

TABEL I  
DAFTAR NEM HASIL EBTANAS  
TAHUN 1989-1990  
SMA "Z" BANDUNG

Prog.	Mata Pelajaran									
	PMP	B.In.	Mat.	Bio	Fis	Kim	Ing	Ek	Tn	Sos
A - 1	7,03	6,07	3,17	4,84	4,61	3,40	3,80	-	-	-
A - 2	6,24	5,60	2,98	4,15	3,10	2,89	4,17	-	-	-
A - 3	5,67	5,80	2,18	-	-	-	4,04	5,81	5,01	5,01

Tampilan NEM tersebut di atas menimbulkan pertanyaan "apakah siswa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diteskan dalam EBTANAS ?", kalau memang benar siswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang di teskan dalam EBTANAS mengapa mereka dulu dapat naik kelas ? apakah hal itu disebabkan soal yang di teskan dalam EBTANAS tidak sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan ? atau memang karena

sistem kenaikan kelasnya terlalu longgar ?. Berbagai pertanyaan dapat dilontarkan berhubung dengan hasil tampilan EBTANAS di atas.

Kenaikan kelas di SMA pada prinsipnya ditentukan atas dasar prestasi belajar dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Di bawah ini ditampilkan data tentang perbandingan prestasi belajar dengan persyaratan kenaikan kelas di sebuah SMA swasta kodya Bandung , lengkapnya sebagai berikut :

**TABEL II**  
**REKAPITULASI PERBANDINGAN**  
**PRESTASI BELAJAR DENGAN KRITERIA KENAIKAN KELAS**  
**SMA "Y" BANDUNG**

K e l a s	Dinyatakan memenuhi krite- ria Kenaikan Ke- las	Dinyatakan tidak memenuhi kriteria Kenaik- an Kelas	J u m l a h
I - 1	25	17	42
I - 2	24	18	42
I - 3	27	15	42
I - 4	29	13	42
I - 5	28	12	40
I - 6	30	10	40
II-1 A-1	27	10	37
II-2 A-1	23	13	36
II-3 A-3	35	5	40
II-4 A-3	30	10	40
II-5 A-3	25	12	37
<b>J u m l a h</b>	<b>303</b>	<b>135</b>	<b>438</b>

Dari tampilan data di atas, ternyata tidak semua siswa yang tidak memenuhi syarat kenaikan tersebut kemudian dinyatakan tidak naik kelas. Dari 135 siswa yang tidak

memenuhi syarat kenaikan kelas tersebut akhirnya dalam penentuan kenaikan kelas sebagian darinya dinyatakan naik kelas, bahkan untuk beberapa sekolah lainnya menaikkan sampai dengan 99% bahkan lebih dari 99% siswanya naik kelas.

Dengan latar belakang tersebut, maka dipilihlah kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas sebagai topik dalam penyusunan tesis ini. Dimana Topik tersebut erat kaitannya dengan komponen penilaian dalam pengembangan kurikulum yang tujuannya untuk mengetahui, menentukan, dan menilai keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum. Hal itu dikemukakan oleh Nasution, lengkapnya :

1. Mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan.
2. Menilai efektivitas kurikulum.
3. Menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. ( 1989, h. 88 )

## **B. Analisis dan Perumusan Masalah**

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai kebijaksanaan kenaikan kelas. Dengan fokus tersebut dirumuskan tema masalah sebagai berikut :

" **Bagaimanakah kebijaksanaan kenaikan kelas dan pola pelaksanaannya di Sekolah Menengah Atas ( SMA ) ?** ".

Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Kepala Sekolah, Wali Kelas, dan Guru Kelas dalam menentukan kenaikan kelas?

- a. Segi-segi akademis apa sajakah yang digunakan untuk menentukan kenaikan kelas ?
  - b. Segi-segi non akademis apa sajakah yang digunakan untuk menentukan kenaikan kelas ?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penentuan kenaikan kelas yang dilaksanakan di SMA ?
- a. Bagaimanakah penilaian yang dilaksanakan guru di SMA ?
  - b. Bagaimanakah pengolahan nilai yang terkumpul oleh wali kelas ?
  - c. Bagaimakah rapat penentuan kenaikan kelas dilaksanakan di SMA ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang kebijaksanaan kenaikan kelas dan pelaksanaannya di Sekolah Menengah Atas ( SMA ). Terutama hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Dasar-dasar pertimbangan yang dipakai untuk penentuan kenaikan kelas di sekolah-sekolah yang menjadi tempat penelitian.
2. Prosedur pelaksanaan penentuan kenaikan kelas yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menjadi tempat penelitian

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan oleh berbagai pihak :

### **1. Bagi Penentu Kebijakan dan Pengembang Kurikulum**

Kesimpulan-kesimpulan tentang kebijaksanaan kenaikan kelas dan pelaksanaannya di Sekolah Menengah Atas dapat menjadi bahan evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum SMA 1984 dan juga umpan balik bagi penyempurnaannya, khususnya berkenaan dengan sistem kenaikan kelas.

Hasil-hasil yang diperoleh tidak hanya memberikan deskripsi tentang kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas, tetapi secara implisit dapat memberikan penilaian terhadap kebijaksanaan itu sendiri. Hasil-hasil penelitian secara implisit juga menjadi bahan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mengajar. Makin banyak dan jauh penyimpangan dari kriteria yang telah ditentukan makin kurang bermutu proses dan hasil belajar mengajar.

### **2. Bagi Ahli Kurikulum**

Temuan dari penelitian ini akan merupakan masukan bagi pengembang konsep, model ataupun sistem pengelolaan kurikulum, khususnya sistem kenaikan kelas. Temuan-temuan tersebut dapat memperkaya konsep, model atau sistem yang ada.

### **3. Bagi Para Pelaksana Kurikulum**

Para pelaksana kurikulum, khususnya Kepala Sekolah,



Wali Kelas, dan Guru-guru sangat membutuhkan informasi berhubung dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kebijaksanaan kenaikan kelas merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh mereka. Informasi tentang berbagai aspek kenaikan kelas tentu merupakan bahan yang berguna bagi para pelaksana kurikulum. Dengan bahan-bahan dari penelitian ini diharapkan mereka dapat mengadakan berbagai penyempurnaan dalam pelaksanaan kenaikan kelas di sekolahnya.

#### 4. Bagi Orang Tua dan Siswa

Orang tua siswa senantiasa mendambakan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang baik bagi anaknya. Kebijakan kenaikan kelas merupakan salah satu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang mempunyai dampak bagi siswa terutama terhadap prestasi dan usaha belajar mereka di sekolah.

Kebijaksanaan dan pelaksanaannya yang tepat dalam kenaikan kelas merupakan harapan para orang tua dan siswa. Temuan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kebijaksanaan kenaikan kelas dan pelaksanaannya. Dengan gambaran itu orang tua dan siswa dapat mengadakan berbagai upaya untuk mengikuti dan menyesuaikannya.